

KERANGKA ACUAN KERJA KERJA (KAK)

RISET UNGGULAN DAERAH
TAHUN 2019



KERANGKA ACUAN KERJA MODEL PERAN KEPEMUDAAN DALAM ERA *DISRUPTION* DI KABUPATEN KEBUMEN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah Indonesia mencatat, 90 tahun silam melalui pergerakan pemuda yang terus dikenang sebagai momentum Sumpah Pemuda, menjadi bukti semangat dan komitmen para pemuda nusantara dalam membangun kejayaan Indonesia di seluruh lini pembangunan. Peristiwa ini menjadi simpul bersejarah yang hegemoninya perlu terus dipelihara, agar kalangan pemuda tidak sampai kehilangan jati dirinya meskipun terus terjadi dinamika perubahan era. Semangat para pemuda yang terlibat dalam Sumpah Pemuda untuk bersatu berjuang demi Indonesai itulah yang harus dijaga.

Pada setiap perubahan era, peran pemuda sangat penting. Tentu dalam bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan masa Sumpah Pemuda. Peran pemuda di masa kini lebih mengarah pada dimensi ide dan penguasaan teknologi. Terlebih saat ini dunia

tengah menghadapi sebuah era baru yang disebut *era disruption* yakni suatu masa di mana banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, yang tidak disadari oleh organisasi, instansi, perusahaan, atau lembaga yang telah mapan sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang ada didalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem lama tersebut.

Pada *era disruption* ini sangat diperlukan adanya *disruption regulation*, *disruption culture*, *disruption mindset*, dan *disruption marketing* yang diharapkan muncul dari ide, inovasi dan gagasan seluruh elemen bangsa termasuk kalangan pemuda berkat penguasaan teknologi yang dimilikinya. Dilihat dari struktur kependudukannya, Indonesia akan mengalami masa-masa bonus demografi pada tahun 2020-2030. Jumlah pemuda yang besar patut ditumbuhkan sebagai harapan. Karakter pemuda yang energik dengan ide-ide yang cemerlang perlu diarahkan agar mampu melahirkan inovasi baru dalam memberi solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi pada *era disruption* ini.

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Namun demikian, ada hal yang perlu digarisbawahi dengan apa yang terjadi pada era *disruption* ini, yaitu terjadinya era disrupsi teknologi atau yang disebut dengan industri 4.0. Salah satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Salah satu bentuk pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa era *disruption* mengarah pada efisiensi semua bidang. Efisiensi yang dikembangkan di era *disruption* ini juga bisa berbahaya, karena terjadi penekanan jumlah tenaga kerja. Sementara di Indonesia tengah terjadi bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang sebagian besar didominasi oleh kalangan pemuda, bisa dua kali lipat dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif. Hal inilah yang menjadi tantangan cukup besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dalam era *disruption* sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan penyegaran

pada model pengembangan peran kepemudaan. Pemerintah perlu mendorong agar para pemuda lebih berani menghadapi iklim yang sangat kompetitif dengan mendayagunakan segenap potensi yang miliki. Melalui Riset Unggulan Daerah ini, diharapkan dapat diperoleh model peran kepemudaan yang tepat yang mampu menjadi solusi yang dihadapi bangsa pada era *disruption* khususnya dalam lingkup wilayah Kabupaten Kebumen.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah diperolehnya model peran kepemudaan di era *disruption* ini, sehingga kalangan pemuda mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terus terjadi sebagai suatu solusi dari berbagai tantangan yang muncul pada era *disruption*.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui bentuk keterlibatan dan peran kepemudaan dalam masyarakat di Kabupaten Kebumen

2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi kalangan pemuda dalam memberikan peran dan partisipasinya pada lingkungan sekitarnya
3. Memberikan gambaran tingkat kemampuan beradaptasi di kalangan pemuda ditinjau dari penguasaan teknologi di Kabupaten Kebumen
4. Menghasilkan model peran kepemudaan di era *disruption*

C. SASARAN

Sasaran Riset Unggulan Daerah Model Peran Kepemudaan dalam Era *Disruption* adalah pemuda sebagai individu maupun organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen

D. LOKASI KEGIATAN

Riset ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kebumen, yang secara spesifik disesuaikan dengan lokasi obyek penelitiannya, terutama jika penelitian dilakukan dengan metode studi kasus.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui DPA BAP3DA Tahun Anggaran 2019.

F. MANFAAT KEGIATAN

1. Memberikan rekomendasi model peran kepemudaan dalam era *disruption*.
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan implementatif peran kepemudaan dalam era *disruption* di Kabupaten Kebumen
3. Sebagai stimulus munculnya inovasi-inovasi peran kepemudaan dalam era *disruption* di Kabupaten Kebumen.
4. Sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut.

G. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan dari Riset Unggulan Daerah Model Peran Kepemudaan dalam Era Disruption di Kabupaten Kebumen adalah:

1. Seluruh rangkaian penelitian ilmiah yang dilakukan di Kabupaten Kebumen sehingga memperoleh hasil penelitian sesuai tujuan yang telah tertuang dalam KAK ini
2. Waktu pelaksanaan penelitian harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan RUD Kabupaten Kebumen Tahun 2019.
3. Mekanisme keikutsertaan calon peneliti dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah terjadwal dan tertuang dalam buku Panduan Pelaksanaan RUD Kabupaten Kebumen Tahun 2019

H. KELUARAN KEGIATAN

1. Tersusunnya hasil riset tentang Model Peran Kepemudaan dalam Era *Disruption* di Kabupaten Kebumen;
2. Memperoleh model yang tepat, inovatif dan implementatif sehingga mampu mengoptimalkan peran kepemudaan dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul dalam era *disruption* di Kabupaten Kebumen.

I. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan riset ini dibutuhkan peneliti/praktisi baik perorangan atau kelompok di bidang sosiologi umum, dengan bidang penelitian antara lain : komunikasi dan media, modal sosial, perencanaan dan kebijakan sosial.

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RISET

Riset dilaksanakan selama 136 hari dan harus selesai tanggal 11 November 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA OPTIMALISASI PENGELOLAAN GARAM DI KABUPATEN KEBUMEN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan garam sudah tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia sehari-hari saat ini. Tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga pada keperluan memasak, lebih dari itu garam juga dibutuhkan sebagai salah satu bahan baku bagi berbagai jenis industri.

Dalam hasil studi yang dilakukan oleh (*Wardhani & et.al, 2016*) menyebutkan bahwa ada beberapa sektor Industri yang memanfaatkan garam sebagai salah satu bahan bakunya. Mulai dari industri yang bergerak di sektor pengolahan bahan pangan seperti minyak goreng, makanan jadi, pengasinan ikan. Industri lainnya adalah industri tekstil, kulit, farmasi, hingga perminyakan. Besarnya kebutuhan garam dari berbagai sektor industri ini yang kemudian menyebabkan adanya standarisasi yang berbeda atas produk garam yang dihasilkan. Sementara itu, oleh industri garam di Indonesia yang masih

kebanyakan bersifat tradisional, standar tersebut belum dapat dipenuhi dengan baik. Serupa dengan berbagai beberapa komoditas lainnya, produksi garam lokal masih menghadapi berbagai permasalahan pola produksi yang tradisional. Sebagai hasil dari sebuah sistem produksi yang tradisional, selama ini kualitas dan kuantitas garam lokal terutama yang berasal dari petani (garam rakyat) hanya mampu memenuhi standar kualitas untuk terbatas untuk keperluan rumah rumah tangga (garam dapur). Bahkan, dilihat dari sisi kuantitas produksinya, jumlahnya juga masih sangat kurang untuk memenuhi tingkat permintaan yang ada selama ini. Akibatnya diperlukan impor garam untuk dapat memenuhi kebutuhan garam tersebut khususnya sektor industri.

Berdasarkan data dari Kemeterian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa 85% produksi garam nasional diproduksi oleh petambak garam. Sedangkan sisanya, 15% diproduksi oleh PT Garam Indonesia. Rendahnya kualitas garam hasil dari petambak garam sebagai akibat penggunaan cara

produksi yang tradisional dan masih sangat tergantung terhadap kondisi cuaca, merupakan salah satu akar permasalahan dalam industri garam nasional.

Sementara itu, di Kabupaten Kebumen telah dilakukan pelatihan pembuatan garam dengan Sistem Tunnel yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, pada bulan april 2018 di Desa Surejan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang didampingi para Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu. Dari hasil pelatihan tersebut diperoleh hasil kristal garam yang putih bersih dan setelah melalui uji lab ternyata hasilnya kadar NaCl sekitar 95,7% dan hasil uji kandungan logam berat negatif.

Tunnel dalam bahasa Inggris artinya terowongan. Pembuatan garam dengan sistem tunnel adalah membuat bak-bak penguapan yang dilapisi plastik HDPE di bagian bawah, ditutup plastik UV di bagian atas dan di desain seperti terowongan. Pada prinsipnya penguapan air laut dilakukan secara

bertingkat dalam petak tertutup dengan ketinggian yang berbeda beda. Air laut yang diambil dari sumur bor di pantai mempunyai kepekatan 3 Be. Air laut dialirkan dari bak penampungan ke tunnel pertama hingga diperoleh derajat kepekatan tertentu. Secara gravitasi, air akan mengalir ke tunnel kedua, karena letak tunnel kedua berada 10 cm dibawah tunnel pertama. Setelah diuapkan beberapa hari akan diperoleh derajat kepekatan tertentu dan ketinggian tertentu, maka air di tunnel kedua dialirkan ke tunnel ketiga dan seterusnya sampai tunnel keempat. Apabila di tunnel keempat kepekatan sudah menunjukkan angka 20 Be dengan alat pengukur baumemeter/hidrometer, maka air dialirkan ke tunnel terakhir atau bak pengkristalan. Di tunnel terakhir, kepekatan diharapkan sampai angka 25 Be untuk menjadi garam konsumsi. Sistem tunnel adalah metode terbaru dalam pembuatan garam untuk mensiasati produksi garam pada musim hujan. Menggunakan plastik UV sebagai penutup menyebabkan udara didalam bak

sangat panas sehingga mempercepat proses penguapan.

Semenjak dilakukannya pelatihan dan hasil pelatihan yang cukup berhasil ini ternyata menginspirasi masyarakat di wilayah lain di kabupaten kebumen untuk memproduksi garam sistem tunel dengan membentuk kelompok yang selanjutnya difasilitasi oleh Penyuluh Perikanan Kabupaten Kebumen dengan membentuk Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dan terdaftar sebagai Kelompok Usaha Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Saat ini telah ada 15 kelompok di wilayah pesisir seperti Puring, Klirong dan Mirit. Dari 15 Kelompok / KUGAR yang ada, 12 diantaranya telah berproduksi secara kontinyu sampai saat ini dengan kapasitas produksi rata-rata 300 kg/bulan. Sehingga sampai akhir Desember 2018 Kabupaten Kebumen telah memproduksi garam sebanyak kurang lebih 11.000 kg atau 11 ton.

Kondisi ini memang menggembirakan bagi kabupaten kebumen karena ada potensi pengembangan komoditi baru yang belum pernah ada selama ini yaitu garam dimana seperti kita ketahui garam diindonesia untuk mencukupinya masih impor. Namun disisi lain para petambak garam tersebut tentunya membutuhkan fasilitasi yang intensif dari Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dalam hal fasilitasi teknis dan peningkatan sumberdaya manusia, serta dukungan OPD lain terkait perijinan, perdagangan, teknis pemasaran, dan lain-lain.

Dalam rangka optimalisasi pengembangan garam di Kabupaten Kebumen inilah perlu dilakukan pengkajian secara detail tentang potensi pengembangan usaha garam di kabupaten Kebumen ini sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan sebuah rekomendasi terkait rencana optimalisasi pengelolaan garam di Kabupaten Kebumen secara efektif dan mampu meningkatkan taraf ekonomi bagi pelaku usahanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah memperoleh gambaran potensi dan fasilitasi yang tepat dalam upaya optimalisasi pengelolaan garam di Kabupaten Kebumen.

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memberi gambaran ilmiah dan aktual tentang potensi usaha garam di Kabupaten Kebumen yang meliputi Potensi Kondisi Geografis dan Tata Ruang, Potensi Sumberdaya Manusia dan Teknologi, Potensi Ekonomi dan Pembiayaan, dan Potensi Pemasaran .
2. Memberi gambaran ilmiah dan aktual tentang fasilitasi yang tepat terhadap pelaku usaha dalam rangka optimalisasi pengelolaan garam di kabupaten Kebumen.

C. SASARAN

Sasaran Riset Unggulan Daerah Optimalisasi Pengelolaan Garam di Kabupaten Kebumen adalah Analisa Potensi dan fasilitasi yang tepat untuk Optimalisasi Pengelolaan Garam di Kabupaten Kebumen.

D. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di Kawasan Pesisir (wilayah Pantai Selatan) Kabupaten Kebumen.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui DPA BAP3DA Tahun Anggaran 2019.

F. MANFAAT KEGIATAN

1. Sebagai gambaran ilmiah dan aktual tentang potensi usaha garam di Kabupaten Kebumen yang meliputi Potensi Kondisi Geografis dan Tata Ruang, Potensi Sumberdaya Manusia dan Teknologi, Potensi Ekonomi dan Pembiayaan, dan Potensi Pemasaran .
2. Sebagai rekomendasi fasilitasi yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan garam di kabupaten Kebumen.

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan garam di Kabupaten Kebumen.
4. Sebagai stimulus muncul nya inovasi-inovasi dalam pengelolaan Usaha Garam di Kabupaten Kebumen.
5. Sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut.

G. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan dari Riset Unggulan Daerah Optimalisasi Pengelolaan Garam di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Membuat gambaran ilmiah dan aktual tentang potensi usaha garam di Kabupaten Kebumen yang meliputi Potensi Kondisi Geografis dan Tata Ruang, Potensi Sumberdaya Manusia dan Teknologi, Potensi Ekonomi dan Pembiayaan, dan Potensi Pemasaran .
2. Membuat rekomendasi fasilitasi yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan garam di kabupaten Kebumen.

H. KELUARAN KEGIATAN

1. Tersusunnya hasil riset tentang gambaran ilmiah dan aktual tentang potensi usaha garam di Kabupaten Kebumen yang meliputi Potensi Kondisi Geografis dan Tata Ruang, Potensi Sumberdaya Manusia dan Teknologi, Potensi Ekonomi dan Pembiayaan, dan Potensi Pemasaran.
2. Rekomendasi terkait pengembangan pengelolaan produksi garam di kabupaten Kebumen.

I. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan riset ini dibutuhkan peneliti / praktisi di bidang pengelolaan garam, baik perorangan maupun kelompok dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana D3/S1 di bidang kelautan/perikanan, ekonomi, teknik industri, teknik kimia.

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RISET

Riset dilaksanakan selama 136 hari dan harus selesai tanggal 11 November 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN GEOPARK NASIONAL KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2018, Geopark Karangsambung Karangbolong telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional. Dengan ditetapkan menjadi Geopark Nasional, maka keberadaan kekayaan geologi yang didukung keragaman hayati dan budaya di Kebumen diakui di taraf Nasional. Hal ini juga sebagai wujud komitmen Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal

Penetapan ini sangat strategis, sebagai lokomotif perekonomian Kabupaten Kebumen yang berbasiskan pada potensi local. Untuk itu perlu dukungan kebijakan anggaran untuk focus pada pengembangan kawasan Geopark dari berbagai aspek. Sebagai satu-satunya

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di wilayah selatan Jawa Tengah yang memiliki kekayaan geologi dan

keindahan Alam yang luar biasa. Asal usul nama Kebumen sendiri berasal dari Kabumian, yang berarti fenomena geologi yang ada di dalam bumi ini ada di Kebumen.

Di wilayah Utara, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan yang telah menjadi rujukan bagi seluruh geologist yang ada di Indonesia yaitu kawasan cagar alam geologi Karangsambung yang berada di Kawasan Utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Sementara di wilayah selatan, Kabupaten Kebumen memiliki kawasan karst Gombong selatan dengan topografi pegunungan yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia. Keindahan alam yang ada di kawasan Karst ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga kawasan ini lekat dengan wisata alam Goa, Bukit dan Pantai.

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung merupakan salah satu kawasan di wilayah Kebumen bagian utara, meliputi Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Sadang. Kawasan Cagar Alam

Geologi Karangsambung ditetapkan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2817 K/40/MEM/2006 berupa 30 lokasi bentukan geologi (geodiversity) yang terdiri dari 28 situs batuan dan 2 situs mata air panas.

Karangsambung merupakan laboratorium alam dan monumen geologi karena menghadirkan variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah penting setelah lahir teori tektonik lempeng, karena menurut para ahli geologi daerah ini pernah menjadi batas lempeng konvergen berupa jalur subduksi pada jaman Kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Kalimantan. Batuan-batuan hasil tumbukan tersebut kini terangkat ke permukaan dan dapat diamati dalam kondisi yang relatif segar. Oleh karena begitu pentingnya, kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai Cagar Alam Geologi Nasional yang dikelola oleh Balai Informasi dan Konservasi Kebumihan Karangsambung-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal ini bertujuan agar batuan-batuan langka yang terdapat di Karangsambung terlindung dari

kepunahan akibat ditambang oleh penduduk. Sebab Karangsambung juga menjadi bukti teori tektonik lempeng dan menjadi referensi dunia.

Kawasan Bentang Alam Karst Gombang merupakan sebuah rangkaian pegunungan atau perbukitan karst yang berada di barat daya Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Karst Gombang sudah ditetapkan sebagai Kawasan bentang Alam Karst Gombang berdasar Keputusan Menteri ESDM Nomor 3873K/40/MEM/2014 dengan luas 40,98 km². Kawasan ini menyangkup tiga kecamatan yaitu Kecamatan Ayah, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Rowokele. Kawasan karst di Gombang Selatan memiliki luas mencapai 4894 hektar dengan panjang perbukitan kapur 8 km dan lebar 3 km. Di sini juga terdapat 182 gua, 2 telaga karst, sungai bawah tanah, ponor, air terjun dan mata air.

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Fungsi mendorong pembangunan sosial, ekonomi,

budaya dan lingkungan secara berkelanjutan akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut.

Konsep Geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbang penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah menemukan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan geopark dengan mengedepankan fungsi konservasi dan edukasi

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberi gambaran aktual tentang pemberdayaan masyarakat dalam kawasan geopark.
2. Memberikan arah dalam perubahan pola mata pencaharian penduduk di kawasan geopark
3. Menghasilkan konsep pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan ekonomi di kawasan Geopark

C. SASARAN

Sasaran Riset Unggulan Daerah adalah masyarakat di wilayah kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong

D. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen

melalui DPA BAP3DA Tahun Anggaran 2019.

F. MANFAAT KEGIATAN

1. Sebagai rekomendasi model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi di kawasan geopark nasional karangsambung karangbolong
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan di Kabupaten Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong.
3. Mendapatkan gambaran partisipasi masyarakat dalam mengisi Geopark Nasional Karangsambung Krangbolong.
4. Sebagai stimulus muncul nya inovasi-inovasi perekonomian masyarakat baik di sektor pariwisata ataupun industry local/geoproduk yang tetap berwawasan lingkungan.
5. Sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut.

G. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan dari Riset Unggulan Daerah Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan terhadap potensi yang dimiliki masyarakat yang dapat dikembangkan dalam rangka mengisi Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong
2. Membuat model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan baik dengan memperhatikan potensi wilayah, baik dalam sektor pariwisata maupun industri.
3. Menyusun roadmap dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong

H. KELUARAN KEGIATAN

1. Tersusunnya hasil riset tentang pemberdayaan masyarakat di kawasan Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong

2. Memperoleh model pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan geopark nasional karangsambung karangbolong berdasarkan pemetaan potensi kawasan dengan tetap berwawasan lingkungan
3. Mendapatkan roadmap pemberdayaan masyarakat di kawasan geoapark.

I. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan riset ini dibutuhkan peneliti / praktisi di bidang persampahan dan lingkungan hidup, baik perorangan maupun kelompok dengan latar belakang pendidikan minimal D3/S1 di bidang Ekonomi, Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RISET

Riset dilaksanakan selama 136 hari dan harus selesai tanggal 11 November 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUATAN KURIKULUM BERBASIS KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENGANGGURAN

A. LATAR BELAKANG

Pada proses pendidikan pemahaman potensi anak didik, merupakan landasan dasar untuk dikembangkannya. Anak didik merupakan pribadi yang unik sehingga tidak dapat diseragamkan menjadi orang yang cerdas secara intelektual. Potensi kecerdasan yang dimiliki anak didik mungkin berupa kecerdasan linguistik, kecerdasan *visual-spatial*, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik tubuh, kecerdasan interpersonal (sosial), kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Praktek pendidikan kita belum memberikan perlakuan yang sama untuk menumbuhkembangkan potensi kecerdasan jamak yang lain, selain kecerdasan intelektual.

Kondisi riil pendidikan kita menurut Musnandar (2014), sebagian besar kegiatan konsentrasinya adalah meningkatkan prestasi

akademik. Sementara itu kecakapan *softskills* seperti kreativitas mengatasi masalah, keterampilan berkomunikasi, percaya diri, interaksi sosial dan sejumlah sikap dan perilaku *soft* lainnya tidak atau kurang diberdayakan oleh para guru.

Sebagian besar kalangan terdidik secara konvensional mengandalkan selembarnya ijazahnya untuk mencari pekerjaan. Upaya pencarian pekerjaan bagi kaum muda akan dihadapkan dengan tantangan lowongan kerja yang sangat terbatas, sehingga menimbulkan pertambahan pengangguran terdidik. Orang-orang muda terdidik mempunyai ekspektasi sukses yang tinggi, apabila tidak memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan karakter positif yang memadai maka harapan dan cita-cita mereka tidak akan tercapai.

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) yaitu : 1) mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, 2) mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, 3) melestarikan kebudayaan, dan

4) menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Pada Kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran muatan lokal pada pendidikan dasar yang dapat diisi dengan prakarya dan kewirausahaan. Namun sebagian sekolah masih memahami dan melaksanakan secara teoritis. Sekolah yang melaksanakan praktik lebih mengarah pada keterampilan menghasilkan barang, yang mendidik anak untuk nantinya menjadi pekerja. Pelajaran kewirausahaan belum diajarkan sebagai upaya merubah pola pikir siswa dan latihan praktis berbisnis.

Proses pembelajaran pada sekolah dituntut menganut proses belajar bermakna sehingga anak mempunyai pemahaman yang benar manfaat dan makna belajarnya. Internalisasi jiwa wirausaha diharapkan menjadikan perubahan pola pikir siswa dari bermental pekerja menjadi bermental pengusaha (wirausahawan). Dengan penanaman jiwa wirausaha pada siswa, diharapkan setelah lulus baik yang ingin langsung bekerja ataupun yang ingin

melanjutkan keperguruan tinggi akan memiliki cara berfikir yang lebih berorientasi menjadi *job maker* (wirausaha) bukan menjadi *job seeker* (pekerja).

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kebijakan penguatan kurikulum berbasis kewirausahaan pada pendidikan dasar diperlukan penelitian. Sehingga dengan Riset Unggulan Daerah dapat diperoleh gambaran pelaksanaan kurikulum berbasis kewirausahaan di lembaga pendidikan guna menyempurnakan kurikulum dimaksud.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penguatan kurikulum berbasis kewirausahaan pada pendidikan dasar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran ilmiah dan aktual tentang implementasi kebijakan penguatan kurikulum berbasis kewirausahaan pada pendidikan dasar.

2. Menyajikan inovasi-inovasi baru dalam upaya penguatan kurikulum berbasis kewirausahaan pada pendidikan dasar.
3. Menghasilkan kurikulum yang berbasis kewirausahaan baik intra kurikuler maupun ekstrakurikuler.

C. SASARAN

Sasaran Riset Unggulan Daerah Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Kurikulum Berbasis Kewirausahaan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan adalah lembaga pendidikan dasardi Kabupaten Kebumen.

D. LOKASI KEGATAN

Lokasi kegiatan di wilayah Kabupaten Kebumen.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui DPA BAP3DA Tahun Anggaran 2019.

F. MANFAAT KEGIATAN

1. Sebagai rekomendasi penyempurnaan kurikulum berbasis kewirausahaan pada jenjang pendidikan dasar.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan dasar.
3. Mendapatkan gambaran implementasi kurikulum berbasis kewirausahaan pada lembaga pendidikan dasar.
4. Sebagai stimulus munculnya inovasi kurikulum berbasis kewirausahaan pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sebagai referensi penelitian lebih lanjut.

G. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan dari Riset Unggulan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa implementasi kurikulum berbasis kewirausahaan di jenjang

pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen.

2. Membuat model kurikulum berbasis kewirausahaan yang dapat diterapkan pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen.

H. KELUARAN KEGIATAN

1. Tersusunnya hasil riset tentang implementasi kurikulum berbasis kewirausahaan di jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen.
2. Memperoleh model kurikulum berbasis kewirausahaan yang dapat diterapkan pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen.
3. Tersusunnya rekomendasi pengambilan kebijakan implementasi kurikulum muatan lokal kewirausahaan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kebumen

I. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan Riset ini dibutuhkan peneliti/praktisi di bidang

pendidikan baik perorangan maupun kelompok dengan latar belakang pendidikan minimal S1 di bidang pendidikan, ekonomi, manajemen.

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RISET

Riset dilaksanakan selama 136 hari dan harus selesai tanggal 11 November 2019.

**KERANGKA ACUAN KERJA
STRATEGI PERCEPATAN DALAM
PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

A. LATAR BELAKANG

Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu cermin kinerja birokrasi secara umum. Pelayanan Publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Pelayanan publik yang tidak akuntabel, lamban, berbelit belit menyebabkan citra pelayanan publik yang tidak baik dan pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pelayanan publik yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 yaitu berkewajiban diantaranya memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Hak memperoleh informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat maupun Daerah diantaranya :

1. Menjadi salah satu area perubahan reformasi birokrasi yaitu “Pelayanan Publik” sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
2. Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian kinerja atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten rutin setiap tahunnya berdasarkan *Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik*;
3. Implementasi amanat Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan
4. Menjadi tujuan dari Misi ke 6 (enam) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun

2016-2021 yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sebagai langkah awal dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu dengan penetapan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai Tahun 2015 s.d. 2018 secara signifikan mengalami peningkatan ke arah “Perbaikan” pelayanan yaitu telah dilaksanakan evaluasi kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP) oleh Tim Teknis Evaluasi Kinerja Pemkab Kebumen secara bertahap setiap tahunnya secara random/acak baik Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan maupun UPT

Dinkes Unit Puskesmas Pemkab Kebumen dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 perolehan nilai rata-rata sebesar 27,28 dengan kategori kinerja pelayanan publik “Kurang”;
2. Pada tahun 2016 perolehan nilai rata-rata sebesar 44,78 dengan kategori kinerja pelayanan publik “Cukup”;
3. Pada tahun 2017 perolehan nilai rata-rata sebesar 56,29 dengan kategori kinerja pelayanan publik “Cukup”; dan
4. Pada tahun 2018 pencapaian nilai rata-rata sebesar 64,11% dengan kategori kinerja pelayanan publik “Sedang”.

Memperhatikan Surat dari Ketua Ombudsman RI Nomor 2468/ORI-SRT/XII/2018 Tanggal 05 Desember 2018 Hal Hasil Peilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Tahun 2018 yang telah dilakukan Periode Penilaian pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UPP) Pemkab Kebumen Periode Observasi pada Bulan Mei s.d. Juni 2018 terhadap 8 (delapan) UPP dengan jumlah 47 produk

layanan administrasi diperoleh nilai 78,15, masuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan “Sedang”.

Adapun rencana aksi tindak lanjut Pemkab Kebumen sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya perbaikan sebagaimana arahan Kepala Ombudsman mulai point 1 s.d. 5 diantaranya memberikan apresiasi kepada Pimpinan UPP yang telah menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik masuk kategori “Zona Hijau” dengan Piagam Penghargaan yaitu :
 - a. DPMPTSP Kabupaten Kebumen; dan
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.
2. Adapun Pimpinan UPP dengan pelayanan publik kategori Zona Kuning dan Zona Merah dengan diberikan Surat Teguran dalam rangka mendorong implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu :
 - a. Dinaker KUKM Kabupaten Kebumen
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
- d. Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen
- e. Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen
- f. Disperkim LH Kabupaten Kebumen

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari riset ini adalah dalam rangka menumbuhkan inovasi/ide gagasan baru sebagai percepatan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Adapun tujuan dilakukan riset ini yaitu :

1. Memberikan gambaran sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyajikan inovasi baru dalam strategi peningkatan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kebumen;

3. Menghasilkan model fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung percepatan kualitas pelayanan publik; dan
4. Menyajikan model dalam pemberian *reward and punishment* bagi Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan publik.

C. SASARAN

Sasaran riset unggulan daerah ini adalah mampu menghasilkan strategi percepatan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ide terobosan baru.

D. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan yaitu pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan riset unggulan daerah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen

melalui DPA BAP3DA Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019.

F. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat riset unggulan daerah ini adalah :

1. Sebagai rekomendasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat diimplementasikan sebagai inovasi baru dalam strategi peningkatan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Mendapatkan gambaran sebagai model/penataan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung percepatan kualitas pelayanan publik; dan
4. Sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pemberian *reward and punishment* bagi Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan publik.

G. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan riset unggulan daerah yaitu bentuk pelayanan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik/masyarakat yang diselenggarakan oleh OPD yang memiliki unit pelayanan publik khususnya pelayanan administratif kepada masyarakat.

H. KELUARAN KEGIATAN

Keluaran riset unggulan daerah yaitu :

1. Kajian terkait sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan peraturan perundang-undangan;
2. Inovasi/terobosan ide sebagai strategi peningkatan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Model/penataan pada pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung percepatan kualitas pelayanan publik yang nyaman dan representatif; dan

4. Kajian model dalam pemberian *reward and punishment* bagi Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

I. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan riset unggulan daerah ini dibutuhkan Peneliti/Praktisi di bidang pelayanan publik baik perorangan maupun kelompok dengan latar belakang pendidikan minimal S1 di bidang sosial politik, administrasi pemerintahan daerah, administrasi pelayanan publik, hukum, teknik sipil.

J. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RISET

Riset dilaksanakan selama 136 hari dan harus selesai tanggal 11 November 2019.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Kabid Litbang,

ttd,

BEKTI HIDAYAT, SE

NIP. 19630715 199303 1 002